BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Vetran No. 52, Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 065/PM.00.02/K.ST-11/11/2023
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **IMBAUAN**

Palu, 20 November 2023

Kepada Yth,
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SE-KOTA PALU
(terlampir)
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan akan dilaksanakan pendaftaran akun resmi media sosial Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:
   "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 4.

Pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:
   "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ***Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;***
   b. ***Materi Kampanye Pemilu; dan***
   c. ***Pelaksanaan metode Kampanye Pemilu".***
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan: ***"Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e dengan cara memastikan:***
   a. ***Kampanye Pemilu melaui Media Sosial oleh Peserta Pemilu dilakukan menggunakan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum".***
   b. ***akun Media Sosial setiap Peserta Pemilu yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi***
   c. ***desain dan materi Kampanye Pemilu melalui Media Sosial yang digunakan minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***
   d. ***Pelaksana Kampanye Pemilu menyampaikan salinan formulir pendaftaran akun Media Sosial Peserta Pemilu kepada:***
      1. ***Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;***
      2. ***Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan***
      3. ***kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan***
   e. ***akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditutup oleh pelaksana Kampanye Pemilu pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.***
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:
   (1) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada: c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
   (2) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
   (5) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan juga salinannya kepada:

a. ***Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;***
b. ***Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan***
c. ***kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.***

5. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Palusebagai berikut:

1. **Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Palu untuk memperhatikan pelaksanaan tahapan pendaftaran akun resmi Media Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;**
2. **Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Palu untuk mendaftarkan akun resmi Media Sosial Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Palu di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;**
3. **Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Palu untuk mendaftarkan akun resmi Media Sosial sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;**
4. **Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Palu untuk mendaftarkan akun resmi Media Sosial paling banyak paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;**
5. **Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Palu untuk menyampaikan Salinan formulir pendaftaran akun resmi Media Sosial kepada Bawaslu Kota Palu, Polresta Palu, dan Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palu.**

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
1. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

LAMPIRAN SURAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA PALU
Nomor :065 /PM.00.02/K.ST-11/11/2023
Tanggal : 20 November 2023
Perihal : Imbauan

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KOTA PALU

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai UMMAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu